

## IMPLEMENTASI KEBIJAKAN GERAKAN LITERASI SEKOLAH PADA MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 KOTA PALU

Hikmah Hikmah<sup>1\*</sup>, Askar Askar<sup>2</sup> & Hamka Hamka<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Magister Pendidikan Agama Islam, Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

<sup>2</sup> Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

<sup>3</sup> Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

Penulis korespondensi: Nama : Hikmah, E-mail: [mayyadahminhatulaydah@gmail.com](mailto:mayyadahminhatulaydah@gmail.com)

### INFORMASI INFORMASI

### ABSTRAK

Volume: 2

### KATAKUNCI

Implementasi, Literasi,  
Simpatiq

Gerakan Literasi Sekolah secara resmi dimulai oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan sebagai implementasi dari permendikbud no 21 tahun 2015 tentang penanaman Karakter di Sekolah. Kemudian pada tahun yang sama permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti yang menjadikan permendikbud nomor 21 tahun 2015 dinyatakan tidak berlaku. Penanaman budi pekerti dimaksudkan seperti menanam biji yang kian berkembang berdasarkan iklim di sekitarnya. Demikian pula dengan karakter peserta didik akan tumbuh sesuai dengan suasana lingkungan yang membentuknya. Lingkungan terdiri atas lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat. Madrasah sebagai lingkungan pendidikan mempunyai kewajiban membelajarkan peserta didiknya menjadi warga masyarakat yang literat sepanjang hayat. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi Gerakan Literasi pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Palu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian mereduksi data dan menarik kesimpulan dengan menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Palu melaksanakan enam komponen literasi hanya saja para guru belum sepenuhnya memahami tentang bagian dari komponen literasi tersebut. Perpustakaan madrasah telah menunjukkan fungsi sebagai wadah bagi peserta didik meningkatkan literasinya dengan menyiapkan berbagai jenis buku bacaan. Kemampuan analisis buku bacaan peserta didik di asah melalui program perpustakaan setiap semester dengan mempresentasikan hasil bacaan peserta didik dihadapan teman-temannya. Strategi pelaksanaan Gerakan Literasi di madrasah ini telah menunjukkan hasil yang sangat baik antara lain ditemukan Di area sekolah, ada pameran hasil karya peserta didik. Dengan berjalannya program GLS, Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Palu melaksanakan program literasi SIMPATIQ yang meluncurkan Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah dengan bentuk pelaksanaannya adalah membaca Al Quran selama 30 menit sebelum memulai pelajaran pada waktu terjadwal. Program ini telah berjalan dengan sangat baik sehingga peserta didik termotivasi untuk menghafal al Quran.

### 1. Pendahuluan

<sup>1</sup> Mahasiswa Magister Program Studi PAI UIN Datokarama Palu. Makalah dipresentasikan pada Seminar Nasional Kajian Islam dan Integrasi Ilmu di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) ke-2 pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu sebagai Presenter.

Merujuk kepada hasil tes PISA 2018 (badan yang melakukan assesmen kepada seluruh negara yang tergabung dalam OECD yaitu negara-negara yang ekonominya sedang berkembang) cukup menyedihkan bagi guru dan sekaligus menjadi tantangan untuk bercermin dan berbenah, bergerak untuk maju. Hasil PISA literasi membaca anak Indonesia mendapat nilai 371 sementara nilai rata rata peserta OECD yang diuji adalah 487. Hasil assesmen ini menunjukkan bahwa masih banyak anak - anak Indonesia di berbagai pelosok mengalami keterbelakangan dalam literasi membaca.

Kemampuan literasi yang rendah, budaya membaca dan menulis tidak menjadi kebutuhan serta kurangnya pemahaman terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi membuat lemahnya daya saing sumber daya manusia. Demikian pula kebutuhan membaca sebagai landasan pendidikan jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah perpustakaan dan buku yang tersedia serta isu budaya baca belum dianggap sebagai isu kritis, sementara banyak isu-isu lain yang dianggap lebih mendesak. Semua ini menjadi acuan perlunya penanaman karakter melalui budaya literasi sejak dini dengan melibatkan berbagai elemen.

Gerakan Literasi Sekolah secara resmi dimulai oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan dengan memberikan paket membaca kepada 20 sekolah di DKI Jakarta sebagai dasar kegiatan literasi. Penanaman Karakter di Sekolah dalam Permendikbud Nomor 21 Tahun 2015 menjadi landasan Gerakan Literasi Sekolah. Permendikbud tersebut, menurut Mendikbud, bertujuan untuk mengembangkan akhlak anak. Mahsun, Kepala Badan Pembinaan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, menyatakan tujuan Gerakan Literasi Sekolah adalah untuk membiasakan dan menggugah minat baca tulis siswa untuk mengembangkan karakter. Diharapkan dalam jangka panjang akan menghasilkan anak-anak dengan kemampuan literasi yang kuat. (Mendikbud,2015).

Pada 13 Juli 2015, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan kembali menerbitkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti di Jakarta. Berlakunya Permendikbud nomor 23 tahun 2015 tentang penumbuhan budi pekerti mengganti atau menjadikan permendikbud nomor 21 tahun 2015 tentang Gerakan Pembudayaan Karakter di Sekolah dicabut atau dinyatakan tidak berlaku. (Pasal 8, Permendikbud nomor 23,2015).

Anis Baswedan menjelaskan penggunaan kata menumbuhkan dalam kalimat menumbuhkan budi pekerti bahwa laksana sebuah biji yang akan tumbuh memiliki daun, batang dan pohon dipengaruhi oleh iklim. Iklim yang baik akan mempengaruhi tumbuh kembang biji tersebut. Biji diibaratkan sebagai peserta didik yang akan tumbuh dengan segala potensi yang dimiliki. Sedangkan iklim merupakan situasi dan kondisi lingkungan tempat peserta didik ditempah. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan prasekolah atau keluarga, lingkungan sekolah serta lingkungan masyarakat. Tiga lingkungan ini sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak dan peserta didik (@sditalmukmintv, 2019.).

Dalam indeks aktifitas membaca 34 Provinsi, dimensi kecakapan masyarakat Sulawesi Tengah berada pada posisi ke delapan belas dalam kategori tinggi. Artinya penduduk Sulawesi Tengah sudah ter bisa membaca dan menulis latin di usia lima belas tahun keatas serta lama sekolah penduduk rata-rata usia 25 tahun. Hal ini menyatakan bahwa pemberantasan buta huruf dan aksara serta kemampuan masyarakat mengakses bahan-bahan literasi telah terlaksana dengan baik oleh pemerintah daerah. Demikian juga daerah telah memberi kesempatan masyarakat untuk memanfaatkan informasi pengetahuan dan mengakses Pendidikan. Namun, pada aktivitas literasi Sulawesi Tengah berada pada posisi ke 28 dengan nilai 31,53 kategori rendah. Berikut grafik indeks aktifitas literasi alibaca 34 provinsi. (Lutman,et.all,2019)

Membaca grafik aktivitas literasi ini, kemampuan literasi masyarakat Sulawesi Tengah masih sangat rendah dan perlu upaya dan usaha untuk ditingkatkan. Upaya meningkatkan literasi hendaknya dilakukan sejak dini agar kompetensi literasi peserta didik Sulawesi Tengah khususnya Kota Palu dapat meningkat dan setara dengan provinsi lain di Indonesia. Madrasah sebagai lembaga penyelenggara pendidikan dan pengajaran berciri khas Islam yang berada di bawah naungan dan binaan Kementerian Agama RI memegang peranan penting menyiapkan manusia Indonesia yang literat.

Selain menjalankan dan mematuhi seluruh aturan yang dibuat dan ditetapkan kementerian Agama, madrasah juga akan melaksanakan regulasi yang dibuat oleh Kementrian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi, namun jika diperlukan dibuat peraturan diskresi.

Kantor Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah melalui Bidang Pendidikan Madrasah mengadopsi gerakan inovatif Gerakan Literasi Sekolah dengan meluncurkan program SIMPATIQ (Siswa Madrasah Pecinta Tilawatil Quran). Program SIMPATIQ diimplentasikan di madrasah-madrasah dengan cara membaca Alquran selama 20 sampai 30 menit sebelum

memulai pembelajaran. Program ini launching pada tanggal 14 April 2017 di Masjid Agung Palu dan telah terlaksana secara nyata pada seluruh madrasah se Sulawesi Tengah agar tumbuh kebiasaan baik pada diri peserta didik madrasah dengan terbiasa membaca Alquran. Oleh karena itu, penting untuk dikaji implementasi gerakan literasi sekolah pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Palu.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi gerakan literasi sekolah pada Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Palu?
2. Aspek-aspek literasi apa saja yang telah berkembang pada peserta didik Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Kota Palu?

## **2. Tinjauan Pustaka**

### **2.1. Teori Kebijakan**

Kebijakan yang mengatur sistem pendidikan disebut kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan lebih mengarah pada memfasilitasi penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan secara inovatif dan berdaya saing untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Kebijakan Pendidikan ada karena munculnya permasalahan yang terjadi di bidang pendidikan termasuk mutu Pendidikan (Mada Sutapa,2008). Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan publik di bidang Pendidikan. Setiap kebijakan membutuhkan realisasi pelaksanaan. Realisasi pelaksanaan disebut implementasi kebijakan. Salah satu tahapan yang harus dilalui dalam suatu kebijakan adalah implementasi kebijakan itu sendiri. Jika kebijakan tidak diimplementasikan maka tidak berpengaruh pada tujuan kebijakan, terlepas dari seberapa baik kebijakan tersebut atau seberapa baik sumber daya pendukungnya. Usaha mengimplementasikan sebuah kebijakan untuk mencapai tujuan bersama bukanlah hal yang mudah. Mulai dari kondisi wilayah, melibatkan banyak orang dengan sifat dan karakter yang berbeda-beda, integritas terhadap tujuan pelaksanaan kebijakan serta dibutuhkannya komitmen serta tanggung jawab yang kuat dalam diri pelaku implementator, sehingga dibutuhkan sarana, upaya dan strategi dalam pelaksanaannya. Karena, implementasi kebijakan merupakan upaya menghubungkan antara tujuan dan realisasinya dengan hasil kerja pemerintah(Haedar Akib,2010) atau dapat dikatakan bahwa implementasi sebagai suatu tugas dengan memanfaatkan sarana untuk mencapai hasil.

Seiring berkembangnya penelitian implementasi, aliran Top Down dan Bottom up, dua aliran pemikiran berkembang menjadi metode yang paling efektif untuk mendeskripsikan implementasi(Richard E. Matland,1995): Teoretisi top-down memandang pembuat kebijakan sebagai aktor sentral. Model top-down, Van Meter dan Van Horn, Mazmanian dan Sabatier melihat implementasi terkait dengan sejauhmana tindakan pemerintah pusat dan kelompok sasaran konsisten dengan tujuan yang dinyatakan dalam keputusan pemerintah secara otoritas. Mazmanian dan Sabatier menyajikan tiga rangkaian faktor umum (kemamputelusuran masalah, kemampuan undang-undang untuk menyusun implementasi, dan variabel non aturan yang memengaruhi implementasi) yang mereka yakini akan menentukan kemungkinan implementasi yang berhasil(Richard E. Matland,1995). Top-down melihat kebijakan berasal dari pusat dianggap paling relevan untuk mendapatkan hasil yang diinginkan karena dilaksanakan sesuai panduan dan dapat dikontrol secara terpusat, dan pelaksana tingkat bawah hanyalah sebagai hambatan untuk implementasi yang sukses.

Variabel dalam model ini, penulis mengutip dalam Richard E Matland:

- 1) Tujuan kebijakan yang jelas dan konsisten.
- 2) Meminimalkan jumlah implementator.
- 3) Membatasi tingkat perubahan yang diperlukan.
- 4) Menempatkan tanggung jawab implementasi dalam sebuah lembaga yang bersimpatik dengan tujuan kebijakan.

Berbeda dengan Teoretis bottom-up, Berma, Hjern dan porter berpendapat bahwa kebijakan benar-benar dibuat di tingkat lokal. Pemahaman implementasi yang lebih realistis dapat diperoleh dengan melihat suatu kebijakan dari sudut pandang populasi sasaran dan penyedia layanan. Implementasi kebijakan terjadi pada dua tingkatan, yaitu: Implementasi tingkat makro dan implementasi tingkat mikro. Pada tingkat implementasi makro, para aktor di pusat merancang program pemerintah; pada tingkat implementasi mikro, organisasi lokal merespon rencana makro, mengembangkan program mereka sendiri, dan menerapkannya. Menurut bottom-uppers, Palumbo, Maynard-Moody, jika para pelaksana di tingkat lokal tidak diberikan kebebasan untuk menyesuaikan program dengan kondisi lokal maka kemungkinan akan gagal (Richard E. Matland,1995)karena kebijakan pada tingkat mikro secara langsung mempengaruhi masyarakat. Namun tetap harus dievaluasi untuk memprediksi dampak dari kebijakan tersebut.

### **2.2. Tahapan pelaksanaan Kebijakan**

Memahami banyaknya konsep yang memengaruhi implementasi kebijakan, perlu diketahui bahwa kebijakan diluncurkan karena adanya masalah yang terdeteksi. Berangkat dari makna kebijakan sebagai seperangkat ide dan aturan yang berfungsi sebagai landasan untuk merencanakan tugas dan tindakan, maka kebijakan tidak terlepas dari makna inovasi.

Inovasi adalah ide, praktik, atau objek yang dianggap baru oleh individu atau unit adopsi lainnya. Tidak masalah, sejauh menyangkut perilaku manusia, apakah suatu gagasan baru secara objektif atau tidak sebagaimana diukur dengan selang waktu sejak penggunaan atau penemuan pertamanya. Kebaruan yang dirasakan dari ide bagi individu menentukan reaksinya terhadapnya. Jika ide itu tampak baru bagi individu, itu adalah inovasi (Ralph Turner, 2007). Kebaruan dalam suatu inovasi tidak hanya melibatkan pengetahuan baru. Seseorang mungkin telah mengetahui tentang suatu inovasi untuk beberapa waktu tetapi belum mengembangkan sikap yang mendukung atau tidak mendukungnya, juga tidak mengadopsi atau menolaknya. "Kebaruan" suatu inovasi dapat dinyatakan dalam bentuk pengetahuan, persuasi, atau keputusan untuk mengadopsi. Seseorang dapat saja mengadopsi inovasi berbeda dan menyebarkannya kepada individu yang lain, namun ada beberapa inovasi yang tidak pernah diadopsi dan bahkan ditinggalkan.

Dalam proses pengembangan inovasi, Everett M. Rogers menetapkan dalam enam fase, yaitu: 1) *Recognizing a Problem or Need*; 2) *Basic and Applied Research*; 3) *Development*; 4) *Commercialization*; 5) *Diffusion and Adoption Diffusion*, dan 6) *Consequences* (Angèle M. Beausoleil, 2018).

- a. *Recognizing a Problem or Need*, proses pengembangan inovasi dimulai dengan cara mengenali masalah atau kebutuhan. Hal ini mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk menghasil suatu inovasi memecahkan masalah atau kebutuhan.
- b. *Basic and Applied Research*, penelitian dasar dan penelitian terapan. Penelitian dasar lebih digunakan pada penelitian untuk menambah pengetahuan ilmiah, sedangkan penelitian terapan ketika untuk mengidentifikasi solusi yang tepat terhadap masalah atau kebutuhan.
- c. *Development*, atau pengembangan. Penelitian dan pengembangan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Pengembangan inovasi merupakan proses terjadinya inovasi baru kedalam bentuk yang diharapkan agar dapat memenuhi harapan dan keinginan khalayak.
- d. *Commercialization*, pada tahap ini menjelaskan bahwa inovasi adalah hasil dari aktivitas penelitian yaitu hasil yang siap untuk diadopsi oleh pengguna, dapat pula diartikan sebagai sosialisasi dalam bentuk seminar atau workshop atau cara lain yang memungkinkan hasil inovasi tersebut dapat dikenal oleh para calon adopter.
- e. *Diffusion and Adoption Diffusion*, difusi atau proses penyebaran inovasi atau gagasan baru dari sumber kepada publik. Adopsi sebagai proses mengambil atau menolak keputusan atau gagasan. Hal yang sangat penting dalam sebuah kebijakan. Adakalanya difusi dilaksanakan sesegera mungkin untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, sebaliknya repuasi dan kredibilitas agen perubahan di mata pelanggan hanya merekomendasikan inovasi yang menguntungkan adopter.
- f. *Consequences*, atau pengembangan inovasi pada proses pengembangan inovasi adalah konsekuensi dari suatu inovasi, didefinisikan sebagai perubahan yang terjadi pada individu atau sistem sosial sebagai akibat adopsi atau penolakan terhadap suatu inovasi. (Angèle M. Beausoleil, 2018)

Kerja terpenting dalam sebuah inovasi adalah difusi. Inovasi tidak populer dan diimplementasikan jika difusi tidak dijalankan. Dalam deffusi inovasi, Roger menggunakan model implementasi klasik dengan lima tahap, yaitu: diseminasi, adopsi, implementasi, evaluasi, institusionalisasi. (Duncan C. Meyers, et all, 2012)

- 1) Diseminasi, menyampaikan informasi tentang adanya suatu inovasi kepada pihak yang berkepentingan,
- 2) Adopsi, keputusan eksplisit oleh unit atau organisasi lokal untuk mencoba inovasi;
- 3) Implementasi, melaksanakan inovasi secara efektif ketika sudah diterapkan;
- 4) Evaluasi, penilaian seberapa baik inovasi mencapai tujuan yang diinginkan;
- 5) Institusionalisasi, unit memasukkan inovasi ke dalam praktek yang berkelanjutan.

### **2.3. Fakta-fakta yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan**

Menurut pencetus teori implementasi dengan pendekatan *Thetop down approach* Brian W. Hogwood dan Lewis A gunn dalam Wahab dikutip oleh Elih Yuliah bahwa agar kebijakan dapat dilaksanakan dengan sempurna harus memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Pelaksanaan program dijamin tidak akan terhambat atau terganggu secara serius
- b. Tersedianya sumber daya yang memadai dan benar-benar tersedia, termasuk sumber daya waktu.
- c. Adanya berbagai ketersediaan sumber – sumber yang dibutuhkan.

- d. Pengimplementasian kebijakan diidasi oleh suatu hubungan kausalitas yang andal.
- e. Hubungan kausalita
- f. Adanya hubungan ketergantungan
- g. Pemahaman yang mendalam dan kesepakatan terhadap tujuan.
- h. Rincian tugas dan urutannya ditempatkan pada tempat yang tepat.
- i. Pihak-pihak yang memiliki wewenang dan kekuasaan dapat menuntut dan mendapatkan kepatuhan yang sempurna. (Elih Yuliah,2020)

Pelaksanaan program dengan menetapkan waktu yang tepat sehingga dapat berjalan dengan baik tanpa mengganggu aktivitas lain dibutuhkan *planning* yang serius serta sumber daya manusia yang handal dan kompeten, memahami tugas yang diembannya serta memahmi dengan baik tujuan kebijakan tersebut. Selain ke dua sumber tersebut, kebijakan tidak akan terealisasi dengan baik tanpa dukungan dari pembiayaan. Sehingga sumber keuangan menjadi prioritas mendukung kebijakan. Sumber-sumber kebijakan ini memegang peran penting dalam proses keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan pemerintah.

Keberhasilan juga ditentukan oleh keterlaksanaan isi kebijakan dan lingkungan implementasi. Isi kebijakan tersebut adalah sebagai berikut: (1) kepentingan yang terkena dampak, khususnya kepentingan yang dapat mempengaruhi bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan; (2) jenis manfaat, khusus manfaat yang menunjukkan dampak yang menguntungkan; (3) Luasnya perubahan yang diharapkan, atau jumlah perubahan yang akan dicapai melalui penerapan ini harus memiliki skala yang jelas; (4) tempat berlangsungnya proses pengambilan keputusan untuk implementasi, strategis.

Lingkungan, meliputi: (1) kekuasaan, kepentingan dan orang-orang yang terlibat dalam pelaksana strategi dan mempengaruhi seberapa baik kebijakan diimplementasikan. (2) Ciri-ciri institusi dan rezim yang mengatur. (3) Tingkat kepatuhan dan daya tanggap subyek.

Sebaliknya, kebijakan dapat mengandung resiko kegagalan. Hogwood dan Gun dalam Yuliah bahwa kegagalan kebijakan karena kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga mengakibatkan implementasi yang tidak efektif dan sulit dipenuhi. Hal ke dua gagalnya implementasi karena adanya faktor eksternal meskipun kebijakan telah dilaksanakan seperti pelaksanaan buruk, kebijakan itu sendiri yang buruk dan kebijakan itu sendiri bernasib buruk. (Elih Yuliah,2020)

#### **2.4. Gerakan Literasi Sekolah (GLS)**

Buku saku GLS mendefinisikan literasi sebagai kapasitas untuk memperoleh akses memahami dan memanfaatkan secara cerdas melalui berbagai aktivitas termasuk membaca, melihat, mendengarkan, menulis dan atau berbicara.

Prinsip panduan pengajaran literasi, yaitu kolaborasi, interpretasi penulis atau pembicara, interpretasi pembaca atau pendengar, konvensi merupakan bagian dari literasi, pengetahuan budaya, refleksi, literasi tidak hanya terbatas pada bahasa lisan dan tulisan, kapasitas untuk identifikasi, determinasi, penemuan, evaluasi, kreasi yang efisien dan terorganisir dengan baik pemanfaatan informasi dan komunikasi untuk memecahkan berbagai masalah (Ahmad Mujib,2019). Dari panduan ini diketahui bahwa kerja sama guru, orang tua dan masyarakat dalam membelajarkan literasi pada peserta didik sehingga nantinya akan muncul kebiasaan baik dalam hal mengidentifikasi dan berkreasi menjelajahi dunia informasi dan komunikasi dalam kehidupan nyata. Ada beberapa teknik yang berkaitan dengan pembelajaran literasi yang dijelaskan oleh Wray, Medwell, Poulson, dan Fox dalam Febrianita (Febrianita Putri Solihah et al, 2018):

- 1) Pembelajaran terprogram yang mengajarkan kode-kode bahasa yang mengacu pada ciri-ciri yang ada pada kata, kalimat dan perataan teks.
- 2) Penciptaan lingkungan literasi yang literat.
- 3) Memberikan beberapa jenis model dan ilustrasi teknik literasi yang berhasil baik dari pendidik maupun dari peserta didik.
- 4) Memantapkan keberhasilan, memperbaiki kesalahan dan meningkatkan kemampuan literasi melalui penggunaan pujian dan kritik yang membangun dalam menanggapi kegiatan literasi anak.
- 5) Membuat dan mendistribusikan tugas-tugas khusus dengan materi pembelajaran yang akan menagkap minat dan kegembiraan peserta didik sepenuhnya.
- 6) Pengamatan berkelanjutan terhadap perkembangan peserta didik melalui tugas yang diberikan dan evaluasi informal.

### **3. Metodologi**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati, peneliti melakukan wawancara dan obsevasi mendalam untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang akurat, mendalam dan menyeluruh. Peneliti menjadikan diri sebagai instrument utama untuk mengumpulkan data dari obyek untuk

mengungkapkan secara kontekstual dengan tujuan mendeskripsikan dan menginterpretasikan makna dibalik fenomena yang terjadi di lapangan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan pada MTs Negeri di Kota Palu yang meliputi: MTs. Negeri 1 Kota Palu. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi (pengamatan), interview (wawancara), kuesioner (angket), dokumentasi dan gabungan keempatnya. Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Aktifitas dalam analisis data dilakukan dengan mereduksi data di mana peneliti merangkum, memilih data yang relevan, yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari pola dan temanya dan membuang yang tidak penting, sehingga data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan selanjutnya. Kemudian menyajikan data dan menarik kesimpulan.

Peneliti menggunakan sumber data dan teknik triangulasi. Triangulasi data merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan banyak sumber data, banyak metode, banyak waktu dan banyak penyidikan. Sedangkan triangulasi sumber menekankan penggunaan metode yang sama pada sumber yang berbeda. Cara yang dilakukan yaitu menggunakan teknik wawancara dengan tema yang sama pada sumber yang berbeda. Peneliti membandingkan hasil wawancara dengan tujuan mengetahui kesamaan antara hasil wawancara dengan hasil observasi yang telah dilakukan.

#### 4. Hasil dan Pembahasan

Kementerian Agama Sulawesi Tengah mengadopsi Gerakan Literasi Sekolah yang menekankan pada literasi Al Quran dengan program SIMPATIQ yang diluncurkan di Masjid Agung Darussalam Kota Palu pada tanggal 14 Juli 2017. Hal ini didasari pada teori pengembangan Literasi Sekolah yang memberikan keluasaan pada adopter untuk melakukan adopsi sesuai dengan kebutuhan dan lingkungan penerapan. Hal ini tertuang dalam visi Misi Madrasah pada poin 5 yakni “Menciptakan peserta didik yang menerapkan nilai-nilai Al Quran melalui program SIMPATIQ. Kegiatan SIMPATIQ dilaksanakan dalam tiga tahapan yakni pembiasaan, pembelajaran dan pengembangan. Pada tahap pembiasaan peserta didik dan guru melaksanakan kegiatan membaca Al Quran sebelum memulai pembelajaran. Pada tahap pengembangan, dilaksanakan dengan menghafal juz tertentu yang telah menjadi program sekolah. Pada tahap pembelajaran, guru mengintegrasikan materi pembelajaran dengan ayat-ayat Al Quran yang relevan. Kepala Kementerian Agama Kota Palu mengungkapkan bahwa “gerakan literasi madrasah diawali dengan membaca Al Quran. Diharapkan peserta didik kita, terlepas dari mengerti tafsir ayat yang mereka baca, tetapi minimal mereka terbiasa membaca Al Quran sehingga terbentuk karakter membaca Al Quran. Selain membaca ayat-ayat Al Quran peserta didik juga diarahkan untuk memahami makna ayat tersebut sehingga dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Apalagi sekarang, peserta didik kita di Madrasah sudah banyak yang menghafal Al Quran melebihi dari target yang telah kita programkan yakni 3 Juz untuk tingkat Tsanawiyah” (Nasarudin L Midu, 2023). “Tentang wisuda tahfiz, sedianya kami telah merencanakan pada tahun 2019 namun tidak terlaksana karena kondisi covid. Nanti terlaksana di tahun 2022 dengan mewisuda peserta didik sebanyak 107 peserta didik dengan hafalan yang bervariasi, 1 juz sampai 15 juz. Hingga tahun 2023 telah mewisuda sebanyak 2 angkatan” (Rusdiana, 2023).

#### 5. Kesimpulan

Proses diseminasi inovasi mempengaruhi difusi. Keberhasilan implementasi kebijakan sangat dipengaruhi oleh bagaimana proses diseminasi dalam pelaksanaan difusi. Kegagalan kebijakan karena kebijakan tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana sehingga mengakibatkan implementasi yang tidak efektif dan sulit dipenuhi.

#### Referensi

- Ahmad Mujib, “7-Prinsip-Dasar-Literasi-Dan Aplikasinya Dalam Pendidikan,” <https://www.Ahmadmujib.Web.Id/2019/01/7>.
- Angèle M. Beausoleil, “Revisiting Rogers: The Diffusion of His Innovation Development Process as a Normative Framework for Innovation Managers, Students and Scholars,” *Journal of Innovation Management* 6, no. 4 (2018): 10.
- Beausoleil, “Revisiting Rogers: The Diffusion of His Innovation Development Process as a Normative Framework for Innovation Managers, Students and Scholars.”

- Dr. H. Nasir, L Midu, M. Pd. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palu. Wawancara, n.d., l. 14 Februari 2023.
- Duncan C. Meyers, Joseph A. Durlak and Abraham Wandersman, "The Quality Implementation Framework: A Synthesis of Critical Steps in the Implementation Process," *American Journal of Community Psychology* 50, no. 3–4 (2012): 123.
- Elih Yuliah, "Implementasi Kebijakan Pendidikan The Implementation of Educational Policies," *Jurnal at-Tadbir: Media Hukum dan Pendidikan* 3, no. 2 (2020): 10
- Febrianita Putri Solihah, Anang Santoso, and Alif Mudiono, "Studi Penerapan Program Pembiasaan Membaca Di Sekolah Dasar," *Jurnal Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan* 3, no. 3 (2018): 14, <http://journal.um.ac.id/index.php/jptpp/article/view/10681>.
- Haedar Akib, "Implemntasi Kebijakan: Apa, Mengapa Dan Bagaimana," *Jurnal Administrasi Publik*, 1, no. 1 (2010): .
- Hj. Rusdiana, S. Pd., M. Pd. Kepala MTs Negeri 1 Kota Palu. Wawancara, Maret 2023.
- Lukman et all., *Indeks Aktivitas Literasi Membaca Puslitjakdikbud\_Indeks Aktivitas Literasi Membaca 34 Propinsi*. (Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan Dan Kebudayaan Badan Penelitian Dan Pengembangan Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan,1.(2019)
- Mada Sutapa, "Kebijakan Pendidikan Dalam Perspektif Kebijakan Publik," *Manajemen Pendidikan* IV, No. 2 (2008)
- Matland, "Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation." *Mendikbud*, "Mendikbud Luncurkan Gerakan Literasi Sekolah," <https://www.kemdikbud.go.id/Main/Blog/2015/08/Mendikbud-Luncurkan-Gerakan-Literasi-Sekolah>.
- Mendikbud, *Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti*, 2015.
- Ralph Turner, "Diffusion of Innovations, 5th Edition, Everett M. Rogers. Free Press, New York, NY (2003), 551 Pages," *Journal of Minimally Invasive Gynecology* 14 (December 31, 2007): 776.
- Richard E. Matland, "Synthesizing the Implementation Literature: The Ambiguity-Conflict Model of Policy Implementation," *Journal of Public Administration Research and Theory* 5, no. 2 (1995): 4.
- SDITALMU'MINTV@sditalmukmintv, "https://www.youtube.com/watch?v=DdAz7fmQ81s," SDIT AL MU'MIN TV@sditalmukmintv, 2019.
- Bunt, G. R. (2003). *Islam in the Digital Age, E-Jihad, Online Fatwas and Cyber Islamic Environments*. New York: Pluto Press.
- Chute, A. G., Hancock, B., & Thompson, M. (1998). *The McGraw-Hill Handbook of Distance Learning: A `how to Get Started Guide" for Trainers and Human Resources Professionals*. London: McGraw-Hill, Inc.